

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan material padat yang terdiri dari bahan organik maupun anorganik yang sudah tidak berguna, yang harus dimanfaatkan supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan mendukung keberlanjutan pembangunan (SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Perkotaan). Sampah menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan perkotaan yang memerlukan sistem pengelolaan yang efektif. Permasalahan ini muncul dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat di wilayah perkotaan.

Permasalahan sampah tidak dapat dihindari karena sampah itu sendiri memiliki banyak dampak negatif (Wilson, 2007). Oleh karena itu, mengelola sampah yang tepat sangat penting bagi wilayah untuk menciptakan lingkungan bersih, sehat dan berkelanjutan. Upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan tersebut sejalan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDGs 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab yang menekankan pentingnya pengurangan timbulan sampah melalui pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam perspektif islam berhubungan dengan penelitian yang diangkat, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf [7]: 56)

Ayat tersebut menegaskan larangan untuk tidak membuat kerusakan di bumi, termasuk pencemaran lingkungan akibat penanganan sampah yang tidak optimal. Sistem persampahan yang tidak teratur, pembuangan secara sembarangan, serta pencemaran tanah dan air merupakan bentuk kerusakan di muka bumi (*fasad fil-ardh*) yang harus dihindari. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik adalah upaya menjaga kelestarian bumi sebagai amanah yang harus dijaga oleh manusia.

Dalam pembangunan perkotaan, salah satu indikator penting yang menunjukkan keberhasilan pengelolaan lingkungan adalah terselenggaranya pelayanan persampahan yang berwawasan lingkungan. Setiap daerah wajib menyelenggarakan pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah (Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah). Pelaksanaannya diperkuat melalui ketentuan teknis yang menekankan pentingnya perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas persampahan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan serta kualitas layanan persampahan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga).

Secara Regional, kondisi pengelolaan sampah di tingkat Provinsi Jawa Barat memberikan gambaran umum mengenai sistem persampahannya, yang menghasilkan timbulan sampah sebesar 8.719,14 ton/hari, namun yang terintegrasi pengelolaan sampah baru 10 dari 27 Kabupaten/Kota, dari total timbulan sampah yang terkelola sebesar 2.252,57 ton/hari, sementara sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA) mencapai 3.397,53 ton/hari. Dalam pengelolaannya, sekitar 22,46% TPA telah menerapkan sistem *control/sanity* dan 77,54% masih menggunakan metode *open dumping*. Berdasarkan sumbernya, presentase timbulan sampah berasal dari rumah tangga yang mencapai 53,42% dengan timbulan sampah 2.722,01 ton/hari (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan persampahan di tingkat provinsi

masih menghadapi tantangan signifikan yang tercermin dalam pengelolaan sampah di Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah di berbagai daerah sistemnya banyak diterapkan masih menggunakan pola “buang-angkut-proses-TPA”, dimana sampah dibuang dari sumber langsung dan diangkut ke lokasi pemrosesan akhir tanpa melalui pemilahan. Pola ini sejalan dengan pelaksanaan sampah konvensional yang masih berfokus pada pengumpulan dan pengangkutan, sehingga menyebabkan tingginya volume sampah yang masuk ke TPA. Seiring dengan berkembangnya kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sistem pengelolaan sampah mulai diarahkan pada pola “buang-pemilahan-angkut-proses-TPA” melalui penerapan tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle* (TPS3R), yang menekankan pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumber sebelum diangkut ke TPA (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga).

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah aspek operasional merupakan komponen utama untuk menentukan pengelolaan persampahan, aspek operasional meliputi pewadahan, pemindahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir (SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Perkotaan). Aspek operasional didukung oleh ketersediaan fasilitas persampahan agar terlaksananya penanganan sampah (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga). Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memperkuat pelaksanaan melalui peraturan daerah menetapkan bahwa pengelolaan persampahan menekankan pengurangan dari sumbernya, serta penguatan sarana dan prasarana persampahan seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menjadi elemen dalam mendukung sistem pengelolaan sampah di daerah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13

Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045).

Sebagai implementasi tersebut, setiap daerah memiliki tantangan dan kondisi pengelolaan yang berbeda-beda salah satunya adalah Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur terletak di wilayah Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk 2.610.316 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,15% (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025), pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor perdagangan, pariwisata, dan permukiman, telah mendorong peningkatan konsumsi masyarakat serta menghasilkan volume sampah yang semakin besar setiap tahunnya. Dengan komposisi sampah yang besar dari timbulnya volume sampah mencapai 1.267,50 ton/hari (DLH Kabupaten Cianjur, 2025). Untuk mengatasi hal tersebut upaya pengurangan timbulnya volume sampah terus dilakukan dengan penyelesaian sampah di tingkat hulu atau rumah tangga karena memberikan kontribusi besar terhadap volume sampah (Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan timbulan sampah belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas pelayanan persampahan sehingga diperlukan upaya peningkatan pengelolaan sampah, terutama pada wilayah dengan aktivitas dan kepadatan penduduk yang tinggi seperti Kecamatan Cianjur.

Di tingkat daerah, untuk arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044, yang menetapkan Kecamatan Cianjur sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dengan fungsi utama Kecamatan Cianjur sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat (Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah), sehingga Kecamatan Cianjur menghasilkan timbulan sampah terbesar di Kabupaten Cianjur (DLH Kabupaten Cianjur, 2024).

Kecamatan Cianjur berkedudukan sebagai ibu kota Kabupaten Cianjur (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Kabupaten

Cianjur Provinsi Jawa Barat). Kecamatan Cianjur memiliki jumlah penduduk 183.070 jiwa dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Cianjur mencapai 6.837 jiwa per km² (BPS Kecamatan Cianjur Dalam Angka, 2025). Peningkatan jumlah penduduk sejalan dengan bertambahnya daya beli, tingkat konsumsi, serta aktivitas masyarakat, yang menyebabkan volume timbulan sampah turut meningkat. Semakin besar jumlah sampah yang dihasilkan, maka sistem pengangkutan yang dibutuhkan bertambah dan memerlukan pengelolaan yang lebih terstruktur (Tchobanoglous dkk., 1993).

Kecamatan Cianjur merupakan wilayah dengan timbulan sampah tertinggi di Kabupaten Cianjur, yaitu mencapai 88,66 ton/hari (DLH Kabupaten Cianjur, 2025). Kondisi tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat terganggu. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah sesuai jadwal (DLH Kabupaten Cianjur, 2025), permasalahan persampahan masih terus meningkat. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, baik dari segi kondisi, persebaran, maupun pemanfaatannya oleh masyarakat, serta rendahnya masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sehingga, masih terjadi penumpukan sampah di beberapa lokasi dan sebagian sarana dan prasarana persampahan yang disediakan belum optimal.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dengan timbulan sampah secara tidak langsung meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan (Faiz, 2021). Penyediaan fasilitas dan dukungan ekonomi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan Pelayanan Persampahan Berbasis 3R (Dimas Zulri, 2020). Pengelolaan sampah belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah (Ernanda, 2019). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek sarana-prasarana dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengelolaan sampah, ketersediaan sarana-prasarana dan penerapan konsep 3R, masih terbatas penelitian yang mengkaji tingkat pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional pada skala kecamatan. Namun aspek operasional merupakan inti dari penyelenggaraan pelayanan persampahan yang secara langsung menentukan efektivitas penanganan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Cianjur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan persampahan di Kecamatan Cianjur menunjukan tingginya timbulan sampah dengan pelayanan persampahan yang belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana persampahan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional dan dapat merumuskan strategi peningkatan pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitiannya adalah :

- 1) Bagaimana tingkat pelayanan persampahan di kecamatan Cianjur berdasarkan aspek operasional dengan pelayanan yang tersedia?
- 2) Bagaimana rumusan strategi untuk peningkatan pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional?

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui tingkat pelayanan persampahan di Kecamatan Cianjur berdasarkan aspek operasional.
- 2) Merumuskan strategi peningkatan pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional.

1.3.2 Sasaran

Sesuai dengan tujuan, maka sasaran dari penelitian ini adalah:

- 1) Teridentifikasinya tingkat pelayanan persampahan di Kecamatan Cianjur berdasarkan aspek operasional.
- 2) Terumuskannya strategi peningkatan pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional.

1.3.3 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- 1) Bagi Pemerintah daerah, dapat menjadi masukan untuk peningkatan pelayanan persampahan meliputi ketersediaan, dan frekuensi layanan.
- 2) Bagi Masyarakat, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap pentingnya menjaga lingkungan, agar tercipta lingkungan yang lebih bersih, lebih estetik, dan mendukung kualitas hidup masyarakat.
- 3) Memberikan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam menyelesaikan tugas akhir.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini meliputi ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah sebagai berikut:

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kajian kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah.
- 2) Melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.
- 3) Mengidentifikasi kependudukan yaitu jumlah penduduk di Kecamatan Cianjur.
- 4) Mengidentifikasi kondisi eksisting pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional di Kecamatan Cianjur.
- 5) Menganalisis tingkat pelayanan persampahan di Kecamatan Cianjur berdasarkan aspek operasional.
- 6) Merumuskan strategi peningkatan pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

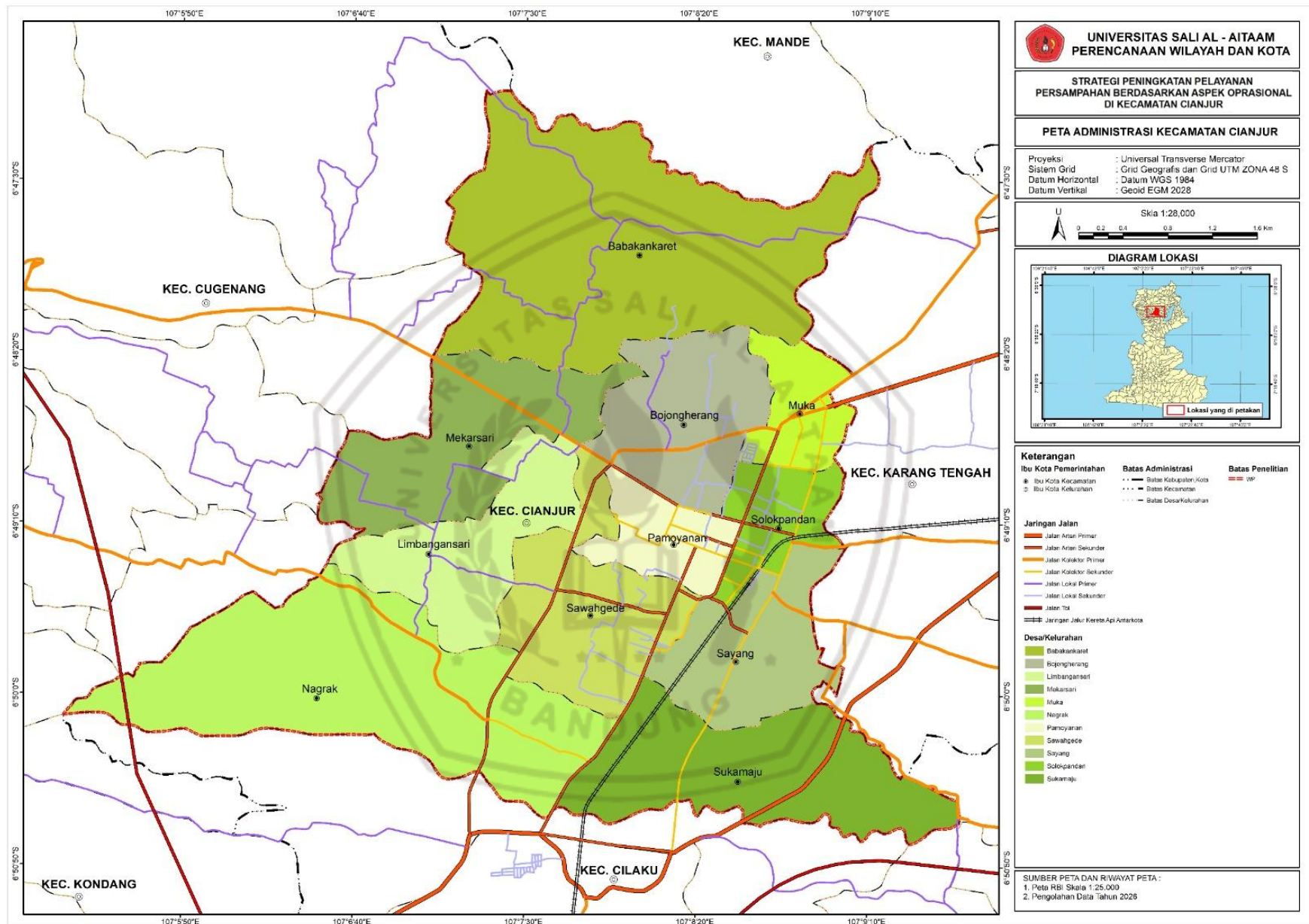
Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kecamatan Cianjur. Kecamatan Cianjur merupakan Kecamatan terkecil di Kabupaten Cianjur yang memiliki luas wilayah 2.624 ha yang meliputi 6 Kelurahan dan 5 Desa yaitu Kelurahan Sayang, Kelurahan Solokpandan, Kelurahan Muka, Kelurahan Bojongherang, Kelurahan Pamoyangan, Kelurahan Sawahgede, Desa Nagrak, Desa Sukamaju, Desa Limbangansari, Desa Mekarsari dan Desa Babakankaret. Adapun batas-batas administrasi Kecamatan Cianjur sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kecamatan Mande;
- Sebelah Barat : Kecamatan Cugenang;
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangtengah; dan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cilaku.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan Cianjur

No	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
1	Desa Nagrak	422
2	Desa Sukamaju	315
3	Kelurahan Sayang	182
4	Kelurahan Solokpandan	66
5	Kelurahan Muka	212
6	Kelurahan Bojongherang	199
7	Kelurahan Pamoyangan	92
8	Kelurahan Sawahgede	114
9	Desa Limbangansari	224
10	Desa Mekarsari	298
11	Desa Babakankaret	500
Jumlah		2.624

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Cianjur Dalam Angka, 2025



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Cianjur

Sumber : Hasil Olahan GIS, 2026

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup materi, ruang lingkup wilayah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan teori, tinjauan kebijakan, studi terdahulu, variabel analisis yang digunakan dan definisi operasional terkait penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi Metode pendekatan, kerangka pemikiran, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini Berisi gambaran umum yang menguraikan wilayah administrasi, kependudukan, dan data penelitian berupa kondisi eksisting persampahan berdasarkan aspek operasional, serta identifikasi pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional, analisis tingkat pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional, dan rumusan strategi peningkatan pelayanan persampahan berdasarkan aspek operasional.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi.